REFORMASI PARTAI POLITIK DAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Lili Romli

Abstract

In this reform era, political parties face questions on institutionalization. Generally, political parties deal with weak institutionalization such as the problems of ideology and platform, cohesiveness and conflict management, as well as their recruitment and cadre system. In addition to this, the existing party system is not compatible with the presidential system so that the elected government could not be effective.

Keywords: Party system, parties institutionalization, and electoral threshold.

Abstrak

Pada era reformasi ini, partai politik menghadapi persoalan terkait dengan pelebagaan partai. Umumnya, partai-partai politik menghadapi persoalan pelebagaan partai yang belum kuat, yaitu masalah ideologi dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kaderisasi. Selain itu, sistem kepartaian yang ada ternyata belum kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif.

Kata Kunci: Sistem kepartaian, pelebagaan partai politik, dan *electoral threshold*.

I. Pendahuluan

Indonesia pasca Orde Baru mengalami perubahan dalam penerapan sistem politik, dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Dengan diterapkan sistem demokratis memberikan perubahan terhadap dinamika kehidupan politik. Di antara perubahan yang terjadi adalah jaminan kebebasan berekspresi dan berasosiasi untuk mendirikan dan atau membentuk partai

politik (parpol). Tidak seperti era sebelumnya, pada masa pasca Orde Baru ini yang disebut sebagai era reformasi, setiap kelompok atau golongan bebas membentuk dan mendirikan parpol serta tidak ada pembatasan jumlah partai politik.

Pada awal reformasi jumlah parpol yang didirikan mencapai 184 partai, dan 141 di antaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 1999 hanya 48 parpol. Menghadapi Pemilu 2004, jumlah parpol yang dibentuk semakin banyak. Ada sekitar lebih dari 200 parpol yang berdiri. Dari jumlah parpol sebanyak itu hanya 50 parpol yang memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan hanya 24 parpol yang ikut Pemilu 2004.

Pada Pemilu 2009, jumlah parpol yang dibentuk sekitar 132 partai, dan sekitar 22 partai politik lolos verifikasi sehingga dapat ikut pemilu ditambah dengan 16 partai politik, yang terdiri atas 7 partai politik yang lolos ET 3% dan 9 partai politik yang mendapat kursi di DPR. Jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 semuanya menjadi 38 partai di tingkat nasional dan 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Persoalan yang muncul terkait dengan banyaknya parpol yang dibentuk dan mengikuti pemilu tersebut tidak berbanding lurus dengan fungsi-fungsi yang diembanya. Keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, melakukan pendidikan politik, dan penyelesaian konflik, belum dijalankan dengan maksimal. Berbagai survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey, publik kecewa dan tidak puas terhadap eksistensi parpol. Partai politik yang ada sangat mengecewakan rakyat karena tidak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi sebaliknya memperjuangkan kepentingan partai dan kelompoknya.

II. Kerangka Teori

Pada era reformasi ini partai politik tampak menghadapi krisis. Partai politik dimata publik memiliki citra yang kurang bagus. Ini terjadi karena partai-partai politik tidak atau belum mampu memainkan dan menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki dengan optimal. Partai-partai politik tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun dalam menghubungkan warga negara dengan pemerintahan.

Kondisi seperti itu ditambah pula dengan persoalan pelembagaan partai yang belum terwujud dengan baik. Yang dimaksud dengan pelembagaan partai politik, menurut Huntington, adalah proses pematangan partai politik, baik

dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budaya. Ia mengatakan, “*Institutionalization is the process by which organizations and procedures acquire value and stability.*”¹ Huntington menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. Suatu sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel, kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia memengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik.²

Bagi Huntington, sebuah sistem kepartaian yang kokoh harus memiliki sekurang-kurangnya dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem partai politik masih mengalami masalah serius dari sisi kelembagaan maupun pelaksanaan demokrasi internalnya.

Scott Mainwaring mengemukakan ada empat persyaratan suatu partai politik dianggap telah melembaga,³: *pertama*, stabilitas dalam kompetisi antarpartai. Dalam suatu sistem yang terlembaga, partai politik memegang peran utama dalam pemerintahan dan posisi partai politik tersebut telah stabil. *Kedua*, akar partai di masyarakat. Partai politik yang melembaga akan berakar kuat di masyarakat, dengan rata-rata masyarakat memilih partai yang sama dan memilih karena partai tersebut. Oleh karena partai politik telah mengakar kuat, maka berbagai kelompok kepentingan pun cenderung berasosiasi dengan partai politik. *Ketiga*, legitimasi partai politik dan pemilu. Legitimasi partai dan pemilu kuat dan partai politik dianggap sebagai institusi demokrasi yang penting, diinginkan dan dibutuhkan keberadaannya. *Keempat*, keorganisasian partai politik. Dalam partai politik yang melembaga, sumber daya partai politik telah mencakupi, baik secara materi maupun sumber daya manusianya. Kepemimpinan partai tidak dibayangi oleh kepentingan pemimpin secara

1 Lihat Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yel University Press, 1968.

2 Ibid.,

3 Lihat Scott Mainwaring, “Party System in the Third Wave”, dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner, ed. *The Global Divergence of Democracies* (The John Hopkins University, 2001), 186.

individu dan proses kelembagaan berlangsung dengan baik.

Sedangkan *Netherlands Institute for Multiparty Democracy* (IMD) melihat pelembagaan berdasarkan demokrasi internal, keutuhan internal, identitas politik berkaitan dengan ideologi partai, ketangguhan organisasi dan kapasitas berkampanye.⁴

III. Pembahasan

Apabila kita terlisik, perkembangan partai politik era reformasi belum menjadi institusi publik yang memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya. Pada masa Orde Baru, partai politik menjadi “mesin” politik penguasa sehingga partai politik lebih diarahkan pada kepentingan pelanggaran kekuasaan penguasa (*status quo*). Ketika memasuki era reformasi, partai politik seakan-akan kaget dengan tuntutan masyarakat yang besar namun tidak disertai dengan kelembagaan yang baik. Partai politik dewasa ini belum memperlihatkan akuntabilitas kepada konstituen.

Partai politik pada era reformasi juga terjebak dalam bentuk oligarkis dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kecenderungan selama ini menunjukkan pengambilan keputusan partai politik bersifat tertutup dan hanya ditentukan oleh sekelompok kecil elit partai. Keputusan tertinggi biasanya berada pada seseorang atau sekelompok kecil elit partai saja. Persoalan mekanisme internal dalam pembuatan keputusan dicirikan dengan sentralisasi dalam pengambilan keputusan. Peran pengurus pusat masih dominan, dan terkadang berbeda dengan aspirasi daerah.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi partai (fungsi pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi penyelesai konflik). keluhan yang muncul adalah di mana partai politik belum melaksanakan fungsinya secara maksimal. Dalam konteks ini sumber masalah belum terlaksananya fungsi-fungsi partai politik tersebut adalah terkait dengan persoalan kelembagaan partai politik. Paling tidak, ada tiga masalah berkaitan dengan kelembagaan partai politik, yaitu: ideologi dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kaderisasi.

1. Ideologi dan Platform

Setiap partai politik dibentuk berdasarkan diri pada ideologi yang hendak diusungnya. Ideologi ini yang kemudian menjadi identitas partai.

4 Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Jakarta, Yayasan Obor, 1999)

Untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari ideologi yang dianut oleh partai yang bersangkutan. Selain itu, ideologi juga merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai suatu partai politik. Ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu partai politik. Ia seharusnya melekat pada kehadiran suatu partai politik.

Ideologi, yang merupakan sistem nilai dan norma, tentu masih bersifat abstrak. Perlu ada penjabarannya lebih lanjut. Ideologi yang dianut oleh suatu partai politik perlu diterjemahkan ke dalam hal-hal yang riil dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara ini akan membantu masyarakat memahami dan mengerti tentang ideologi, yang bersifat abstrak itu, yang dianut oleh suatu partai politik.

Keberadaan ideologi dalam sebuah partai juga menjadi pedoman nilai dalam melakukan program dan aktifitas kerja politik adalah hal yang penting. Ia menjadi pegangan bagi setiap kader dan pengurus partai dalam mengejawantahkan ideologi tersebut menjadi program, kegiatan atau aktifitas partai di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di samping itu, ideologi juga menjadi posisi politik (*political stance*) bagi setiap partai politik dalam mendiskusikan serta memperdebatkan hal-hal yang menyangkut kehidupan ekonomi, sosial ataupun politik. Hal yang juga tak kalah penting, ideologi bagi partai dapat menjadi basis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya.

Dalam konteks kebijakan publik, ideologi juga berperan dalam menentukan posisi apa yang harus ditentukan bagi partai untuk mendorong atau bahkan menolak suatu kebijakan. Sementara itu dalam konteks hubungan dengan para pemilih, ideologi juga dapat menjadi daya tarik bagi pemilih untuk menentukan partai mana yang sesuai dengan cara pandang yang mereka yakini. Dalam konteks ini, peran ideologi ini diyakini menjadi panduan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya di kotak suara yang kemudian dikenal dengan istilah *ideology identification*.

Cara untuk menterjemahkan ideologi yang dimiliki oleh suatu partai politik ke dalam hal-hal yang riil dan konkret dirumuskan dalam bentuk *Platform* partai politik. Platform partai berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Platform partai memuat hal-hal penting dan mendasar yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penyusunan hal-hal yang harus dilakukan, seperti program kerja dan isu politik. Platform partai merupakan cetak biru, di mana sistem nilai dan norma (ideologi) diterjemahkan dan menjadi landasan bagi

penyusunan hal-hal yang bersifat lebih konkret.⁵

Platform partai dipandang penting untuk dua sasaran. *Pertama*, sebagai instrumen komunikasi kepada massa konstituen tentang apa yang diperjuangkan partai. Selain mencerminkan identitas partai, platform juga menjadi panduan arah partai ketika mempunyai akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, platform dapat dilihat sebagai proposal yang ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih. *Kedua*, platform adalah cara pandang partai tentang bagaimana seharusnya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang dikelola. Platform adalah turunan dari ideologi partai, yang memuat nilai, harapan, dan *benchmark* normatif partai. Dengan demikian, bagi anggota partai, platform merupakan acuan sikap dan tindakan dalam kehidupan politik mereka sehari-hari.

Bagaimana tentang ideologi dan platform partai-partai politik di Indonesia. Bila merujuk pada asas partai yang dimiliki oleh masing-masing partai politik, secara garis besar partai-partai politik berdasarkan pada tiga ideologi, yaitu Islam, Nasionalisme, dan Sosialisme Demokrat. Dari ketiga ideologi tersebut, sebagian besar partai-partai politik yang ada mendasarkan diri pada ideologi Islam dan Nasionalisme (Pancasila).

Ideologi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik tersebut belum dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam bentuk yang riil dan konkret. Umumnya partai-partai politik yang ada masih berpaku pada ideologi mereka anut yang masih abstrak tersebut, dan ideologi yang mereka miliki belum sampai diturunkan dalam wujud konkret dalam bentuk cetak biru (platform) berupa program dan kebijakan-kebijakan yang riil. Bila pun ada program dan kebijakan yang mereka rumuskan, hal itu masih tetap bersifat umum. Karena ideologi partai belum dijabarkan dalam bentuk pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan, maka perbedaan di antara partai politik itu baru tampak secara simbolis. Untuk meningkatkan pelebagaan partai politik dari segi identitas nilai partai perlu dirumuskan platform partai yang dikomunikasikan secara terus-menerus.⁶

Islam sebagai ideologi yang dimiliki oleh partai-partai Islam, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan antara partai Islam yang satu dengan partai Islam yang lainnya. Demikian juga nilai-nilai agama –terutama konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dan *rahmatan lil alamiin*, yang diambil dari ajaran Islam yang

5 Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 119.

6 Lihat Ramlan Surbakti, "Tingkat Pelebagaan Partai Politik", *Kompas*, 6 Januari 2003.

dianut oleh PAN maupun PKB, pada dasarnya tidak berbeda dengan kedua partai Islam di atas. Perbedaannya hanya terletak pada peletakan asas Pancasila, nasionalisme, pluralisme dan terbuka pada PAN dan PKB, misalnya.

Pada sisi yang berseberangan, PDIP dan Partai Demokrat pada dasarnya lahir dari ideologi yang sama, nasionalisme. Namun demikian, dalam menerjemahkan nasionalisme sebagai ideologi, Partai Demokrat dan PDIP mempunyai pandangan yang berbeda. Semangat nasionalisme menurut Partai Demokrat diinterpretasikan sebagai tidak membedakan ras, suku, bangsa, jenis kelamin, profesi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, PDIP berpendirian bahwa nasionalisme berkaitan dengan wawasan kebangsaan, sebagai cetusan rasa memiliki bangsa dan negara yang harus dipelihara kelanggengannya.

Dasar nasionalisme yang melekat pada PDI dan kemudian diteruskan oleh PDIP diambil dari konsepsi Marhaenisme yang dianut oleh Kebangkitan PNI 1927, yang merupakan cikal bakal ideologi nasionalisme PDIP. Berdasarkan ideologi nasionalisme-marhaenisme ini pula kemudian PDIP mengambil jati diri (identitas) sebagai partai kerakyatan.

Persoalan yang muncul, ideologi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik tersebut belum dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam bentuk yang riil dan konkret. Umumnya partai-partai politik yang ada masih berpaku pada ideologi mereka anut yang masih abstrak tersebut, dan ideologi yang mereka miliki belum sampai diturunkan dalam wujud konkret dalam bentuk cetak biru (platform) berupa program dan kebijakan-kebijakan yang riil. Bila pun ada program dan kebijakan yang mereka rumuskan, namun masih tetap bersifat umum.

Platform partai dipandang penting untuk dua sasaran. *Pertama*, sebagai instrumen komunikasi kepada massa konstituen tentang apa yang diperjuangkan partai. Selain mencerminkan identitas partai, platform juga menjadi panduan arah partai ketika mempunyai akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, platform dapat dilihat sebagai proposal yang ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih. *Kedua*, platform adalah cara pandang partai tentang bagaimana seharusnya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang dikelola. Platform adalah turunan dari ideologi partai, yang memuat nilai, harapan, dan *benchmark* normatif partai. Dengan demikian, bagi anggota partai, platform merupakan acuan sikap dan tindakan dalam kehidupan politik mereka sehari-hari.

Karena belum diterjemahkan secara riil, tidak heran bila sulit ditemukan perbedaan antara partai politik yang satu dengan yang lainnya. Padahal titik

utama untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lainnya terletak pada, seperti dikemukakan di atas, ideologi dan platform partai politik. Karena ideologi dan platform ini yang menjadi ciri dan identitas suatu partai politik, yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Partai-partai lain yang mengklaim diri lahir dari atau dilahirkan oleh kalangan nasionalis juga tidak mampu menunjukkan diferensiasi yang nyata. Munculnya banyak partai dari basis ideologi yang sama lebih didorong oleh ketidakmampuan untuk mengkompromikan perbedaan pandangan atau kepentingan di dalam “keluarga besar” masing-masing, khususnya dalam soal pemilihan pimpinan partai. Kesulitan yang sama juga ditemukan ketika publik membandingkan kebijakan atau sikap partai-partai terhadap isu yang berkembang dalam kehidupan bernegara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata di antara mereka.

2. Kohesivitas dan Manajemen Konflik

Konflik merupakan suatu yang *inheren* dalam setiap masyarakat atau suatu organisasi. Tidak ada suatu masyarakat atau organisasi yang bisa lepas dari konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tersebut, bisa dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk non-kekerasan. Konflik dalam bentuk kekerasan adalah konflik yang saling melukai atau saling menghancurkan satu sama lain dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan konflik non-kekerasan adalah karena perbedaan pendapat dan atau gagasan. Dalam alam demokrasi, perbedaan pandangan atau pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi itu sendiri.

Persoalannya adalah bagaimana konflik yang terjadi tersebut tidak sampai menghancurkan sistem kemasyarakatan (disintegrasi sosial) atau merusak kohesivitas (keutuhan) organisasi. Bagaimana agar konflik yang terjadi tidak bersifat destruktif tetapi justru bersifat konstruktif? Ini merupakan tantangan yang harus bisa dijawab dan diatasi agar konflik (perbedaan pendapat) yang terjadi memberikan energi bagi perkembangan dan kemajuan suatu organisasi. Namun, kemampuan partai untuk melaksanakan fungsi tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Alih-alih partai politik sebagai *agent of conflict management* gambaran yang kerap muncul adalah konflik internal partai itu sendiri.

Salah satu sumber dari konflik internal partai adalah faksionalisme. Faksionalisme di tubuh partai politik adalah hal yang tidak bisa dihindari. Zariaski mengatakan faksi sebagai kekuatan-kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh dari institusi-institusi penting di dalam kepemimpinan

partai mengenai perumusan kebijakan partai dan penentuan kandidat untuk mengisi jabatan politik di partai maupun pemerintahan.⁷

Sebagai sebuah faksi politik, kelompok tersebut bersaing dengan lawan-lawannya untuk memperoleh keuntungan kekuasaan di dalam kelompok yang lebih luas, dimana mereka menjadi bagian di dalamnya. Faksi di dalam partai politik dapat mencerminkan berbagai kombinasi motif yang berbeda, seperti perbedaan ideologis atau isu, perbedaan sosial dan budaya atau pertarungan kepemimpinan pribadi. Meskipun biasanya istilah ini dianggap sebagai kebalikan dari istilah kohesi, namun ada sebagian sarjana yang melihat faksi di dalam partai sebagai sesuatu yang konstruktif.

Pada umumnya konflik di dalam tubuh partai politik tidak jauh berbeda antara satu partai dengan yang lain. Beberapa konflik yang pernah mencuat di media massa diantaranya adalah konflik antar faksi, konflik pada kongres partai (cabang, daerah, dan nasional), konflik personal antar pengurus dan konflik antar tingkat pengurusan (vertikal), ataupun konflik antar pengurus pada tingkatan yang sama atau antar sayap partai (horizontal).

Konflik muncul sebagai konsekuensi logis dari hukum pasar dimana kekuasaan yang “sedikit” diperebutkan oleh orang yang “banyak”. Untuk mendapatkannya pihak-pihak terkait harus berkompetisi. Di dalam partai yang memiliki pelembagaan yang baik, kompetisi tersebut diatur di dalam mekanisme yang sudah terlembaga dan disahkan menjadi statuta partai ataupun anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Dengan adanya aturan main yang terlembaga siapapun yang memenangkan kompetisi akan mampu mendapatkan kekuasaan itu dengan elegan, tanpa memunculkan keberatan yang berarti dari pihak yang kalah.

Konflik yang mengidap pada partai-partai politik karena tidak adanya tradisi berpartai di kalangan elit-elit kita. Setiap perbedaan selalu diakhiri dengan perpecahan, tidak dengan konsensus. Tampaknya perpecahan sudah menjadi bagian dari perilaku elit politik. Padahal dalam politik yang dituju dari perbedaan-perbedaan adalah untuk menuju konsensus bukan perpecahan, karena yang mereka perjuangkan adalah kepentingan rakyat.

Bila partai politik terjadi konflik maka pengelolaannya tidak melibatkan pengadilan. Kader politik harus mengelola konflik internalnya dan penyelesaiannya melalui mekanisme rumah tangga internal partai politik. Konflik internal partai politik dalam penyelesaiannya agar tidak melibatkan pengadilan.

7 Ian McAllister, “Party Adaptation and Factionalism in within the Australian Party System”, *American Journal of Political Science*, Vol. 35, No. 1 February, 1991 hal. 208.

Ini penting dilakukan dalam rangka untuk memberikan pendidikan politik partai politik agar bisa mewujudkan tradisi mengelola konflik internalnya secara elegan dan dewasa. Partai politik “dipaksa” mengatasi konflik internalnya sebagai jalan untuk mendewasakan cara berdemokrasi. Saatnya kader-kadaer partau politik menghormati mekanisme internal partai politiknya. Juga untuk mendidik para kader partai politik untuk menghormati aturan rumah tangganya sendiri.

Mengapa konflik partai politik harus diselesaikan melalui mekanisme internal? Mekanisme penyelesaian konflik melalui mekanisme internal akan membendung bentuk-bentuk intervensi dari luar. Bila menyelesaikan konflik melalui pengadilan, kemungkinan terjadi manuver-menuver kepentingan untuk mempengaruhi keputusan akan terjadi. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme internal dalam rangka menanamkan dan menumbuhkan tradisi berpartai di kalangan elit-elit politik.

Menjadi suatu keniscayaan di dalam diri partai politik keharusan mengembangkan dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi. Tidaklah masuk akal jika suatu partai politik menuntut kehidupan politik yang demokratis, namun tidak mempraktekkan demokrasi dalam tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, di dalam diri partai politik harus juga mempraktekkan apa yang disebut dengan demokrasi internal partai.

Yang dimaksud dengan demokrasi internal partai yaitu partai yang memiliki aturan dan prosedur yang bersifat impersonal untuk menghindari terjadinya kontrol sewenang-wenang dalam pemilihan internal serta berfungsinya partai di bawah kendali pimpinan atau klik tertentu. Aturan seperti itu harus dijalankan, jika tidak, partai tersebut tidak akan melembaga dan tidak benar-benar demokratis. Demokrasi internal partai berarti seluruh komponen dan fungsionaris partai mengikuti proses yang benar dan akuntabel terhadap segenap anggota serta organisasi yang sah tercantum dalam Anggaran Dasar Partai.

Sebagian besar partai di mana demokrasi internal belum sepenuhnya berjalan. Beberapa partai politik cenderung bersifat sentralistik. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik yang meluas menjadi perpecahan faksi di tingkat elit. Kendati seleksi kepengurusan diatur secara tegas dalam AD partai, pelaksanaannya banyak yang mengabaikan aturan-aturan tersebut: seperti sikap pimpinan yang tidak demokratis, kekurangan SDM yang potensial, dan sebagainya.

3. Rekrutmen dan Kaderisasi

Dalam setiap organisasi, anggota merupakan sumber dukungan utama. Dalam organisasi partai politik, peran anggota signifikan karena melalui

para anggota ini akan berperang sebagai juru bicara untuk menyuarakan dan menyebarkan platform dan program partai kepada masyarakat. Selain itu, anggota merupakan sumber kaderisasi yang dapat melahirkan calon-calon pemimpin partai politik.

Untuk mengisi keanggotaan tersebut, partai politik melakukan rekrutmen anggota. Partai politik yang baik tentu memiliki sistem rekrutmen yang baik. Sistem rekrutmen itu mencakup pola seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi para anggotanya. Dengan demikian, tidak akan sembarangan seseorang secara otomatis dapat memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu.⁸

Selain rekrutmen anggota, partai politik yang melembaga dengan baik akan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi anggota-anggotanya secara terus menerus. Tujuan dari kaderisasi dan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka (para anggota) mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa, dan negara.⁹

Kaderisasi dan pendidikan politik dilakukan oleh partai politik dalam rangka untuk mencetak pemimpin. Oleh karena itu, partai politik yang terlembaga akan melakukan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan secara reguler. Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup masing-masing tingkatan kepengurusan. Melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini, diharapkan nanti akan lahir kader pemimpin partai yang berkualitas.

Persoalan yang muncul umumnya pada partai-partai politik saat ini adalah kurang melembaganya proses rekrutmen anggota. Pola seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi para anggota kurang dilakukan secara lebih memadai. Memang ada beberapa partai politik sudah melakukan seperti itu, namun sebagian partai politik yang lain belum melakukan secara melembaga. Fenomena munculnya “kader instan”, ketidaksiapan parpol dalam mengajukan calon anggota legislatif atau eksekutif, semua itu menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pola rekrutmen secara sistematis dan ajeg.¹⁰

Sementara itu dalam sistem keanggotaan, memang semua partai sudah menggunakan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi mereka yang telah menjadi

8 Lihat, IPCOS, *Partai dan Kita*, (Jakarta, 2001), hlm. 28.

9 Tentang Kaderisasi dan Rekrutmen partai politik, lihat Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2002), hlm. 183.

10 Fenomena tentang munculnya “kedert instant” ini banyak diberitakan diberbagai media massa dengan beragam tanggapan, seperti di Kompas, Media Indonesia, dan Koran Tempo.

anggota partai. Namun persoalannya adalah umumnya partai-partai politik belum memiliki data yang pasti dan akurat tentang jumlah anggota yang terdaftar di masing-masing partai yang ada. Yang ada baru berupa klaim yang dikemukakan oleh masing-masing partai politik. Selama ini yang terdata dengan baik baru sebatas jumlah pengurus partai.

Serupa dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik yang masih mengidap masalah, dalam soal kaderisasi dan pendidikan politik juga demikian. Partai-partai politik saat ini, dalam hal kaderisasi dan pendidikan politik masih lemah. Memang harus diakui, ada beberapa partai politik sudah melakukan proses kaderisasi secara berjenjang. Namun demikian, proses kaderisasi masih terbatas pada pemahaman kader tentang visi-misi partai politik yang bersangkutan, belum sampai pada promosi hasil kaderisasi dan pendidikan politik itu untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Untuk mengisi jabatan-jabatan publik tersebut, umumnya partai-partai politik mengambil dari luar kader atau anggota partai yang bersangkutan.

Fenomena kader partai “loncat pagar” dari partai yang satu ke partai politik yang lainnya menunjukkan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik belum berhasil menanamkan loyalitas yang kuat. Bisa jadi sistem nilai dan norma (ideologi) suatu partai belum berhasil terinternalisasi ke dalam diri para kader. Akhirnya, kader dengan mudah “loncat pagar” ke partai lainnya.

4. Problem Sistem Kepartaian

Kajian teoritis tentang sistem kepartaian mengacu pada aspek tipologi numerik (*numerical typology*), yaitu sejumlah partai yang dianutnya. Studi klasik yang dilakukan oleh Duverger, misalnya, memperlihatkan hal tersebut (jumlah partai) yang membagi sistem kepartaian atas sistem partai tunggal, dwi partai, dan multi partai. Begitu juga studi-studi yang dilakukan oleh Blondel dan Rokkan, melihat sistem kepartaian dilihat dari segi jumlah. Namun berbeda dengan Duverger, Blondel dan Rokkan menambahkannya dengan melihat segi kompetisi di antara partai-partai yang ada sehingga melahirkan sistem partai dominan dan tidak dominan.

Sementara itu, Sartori melihat sistem kepartaian selain berdasarkan jumlah dan kompetisi juga berdasarkan jarak ideologi di antara partai-partai yang ada. Ia menggolongkan sistem kepartaian didasarkan atas jumlah kutub (polar), jarak di antara kutub-kutub itu (polaritas), dan arah perilaku politiknya. Berdasarkan itu, ia lalu mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu pluralisme sederhana, pluralisme moderat, dan pluralisme ekstrim.

Sama dengan Sartori, Sairoff juga menjelaskan sistem kepartai berdasarkan jarak ideologi, sehingga menghasilkan sistem dua partai, dua setengah partai, multi partai moderat dan multi partai ekstrem. Dalam sistem multi partai moderat terbagi atas: satu partai dominan, dua partai utama, dan keseimbangan antar partai. Begitu juga dengan multi partai ekstrem, yang terbagi atas: satu partai dominan, dua partai utama, dan keseimbangan antar partai.¹¹

Berbeda dengan hal di atas, Huntington mengkaji sistem kepartaian dari sudut institusionalisasi (pelembagaan). Sistem kepartaian yang kokoh, demikian Huntington, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik.¹² Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru kedalam sistem politik.

Senada dengan Huntington, Mainwaring juga melihat sistem kepartaian dari sudut institusionalisasi. Meski berangkat dari konsep yang sama dengan Huntington, ia mengelompokan sistem kepartaian melihatnya berdasarkan (1) Stabilitas dalam persaingan kepartaian; (2) Mengakarnya parpol dalam masyarakat; (3) Legitimasi atas partai dan pemilu sebagai mekanisme yang sah; dan (4) Struktur organisasi partai yang stabil.¹³

Herbert Kitschelt mengusulkan klasifikasi partai-partai politik dalam kerangka membahas isu sistem kepartaian berdasarkan atas tiga tipe ideal, yaitu partai-partai programatik, karismatik, dan klientistik. Partai programatik adalah partai yang mendasarkan pekerjaannya pada program partai secara khusus. Partai karismatik ditentukan oleh kepemimpinan seseorang yang karismatik. Dan partai klientistik adalah partai yang bekerja lebih condong pada kepentingan pribadi, keuntungan partisan, dan jasa untuk klien setia mereka.¹⁴

11 *Ibid.*, hal. 34.

12 Manuel Kaisiepo, "Partai Baru atau Sistem Kepartaian Baru, *Kompas*, 20 September 1994.

13 Scott Mainwaring, "Party System in The Third Wave", dalam Larry Diamond and Marc F Plattner, *The Global Divergence of Democracies*, Baltimore and London; The Johns Hopkins University Press, 2000.

14 Dikutip dari Aurel Croinssant, "Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur: Perspektif Perbandingan", dalam Aurel Croinssant, Gabriele Bruns, dan Marei John (eds), *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Jakarta; FES dan Pensil-324, hal.452-453.

Berbagai Tipe Sistem Kepartaian¹⁵

Author	Principal Criteria for Classification	Principal Types of Party System Identified
Duverger (1954)	Numbers of parties	- One-party system - Two-party systems - Multiparty systems
Dahl (1966)	Competitiveness of opposition	- Strickly competitive - Cooperative-competitive - Coalescent- competitive - Strickly- Coalescent
Blondel (1968)	Numbers of party Relative size of parties	- Two-party systems - Two-and-a-half-party systems - Multiparty systems with one dominant party - Multiparty systems without dominant party
Rokkan (1968)	Numbers of party Likelihood of single-party majotities Distribution of minority party strengths	- The British-German “1 vs 1 + 1” system - The Scandinavian “1 vs 3-4 sistem - Even multiparty systems; “1 vs 1 vs 1 + 2-3”
Sartori (1976)	Numbers of party Ideological distance	- Two-party systems - Moderate pluralism - Polarized pluralism - Predominant -party systems
Siaroff (2000)1	Numbers of party Ideological distance	- Dua Partai - Dua Setengah Partai - Multi-Partai Moderat dengan satu partai dominan - Multi-Partai Moderat dengan Dua Partai Utama - Multi-Partai Moderat dengan adanya Keseimbangan antar partai Utama - Multi Partai Ekstrem dengan satu partai dominan - Multi Partai Ekstrem dengan Dua Partai Utama - Multi Partai Ekstrem dengan Keseimbangan antar Partai

Sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mempraktekan sistem kepartaian berdasarkan sistem multipartai, meski dalam derajat dan kualitas yang berbeda. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) menerapkan sistem multipartai dengan tingkat kompetisi yang tinggi, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), meski mempraktekkan sistem multipartai, tetapi tidak ada kompetisi dan hanya sekedar jumlah saja karena partai-partai politik yang ada tidak memiliki peran apa-apa. Begitu juga masa Orde Baru dengan jumlah yang hanya tiga partai, masih disebut sebagai sistem multipartai juga. Namun sistem multipartai yang ada pada masa Orde Baru sama dengan

¹⁵ Peter Mair, “Party Sistem and Structures of Competition”, dalam Lawrence Leduc, Richard G. Niemi, and Pippa Norris (eds.), *Comparing Democracies: Election and Voting in Global Perspective*, California: Sage Publication, Inc., 1996, hal. 86.

masa Demokrasi Terpimpin. Bedanya, pada masa Orde Baru terdapat partai politik dominan, yakni Golkar, tetapi terus menerus berkuasa sehingga terbentuk sistem kepartaian hegemonik.

Pada masa reformasi juga menerapkan sistem multipartai. Tetapi, sistem multipartai yang berjalan sangat ekstrim (*hyper multyparties*) karena begitu banyaknya jumlah partai politik yang ada. Sistem multipartai yang berjalan saat ini, sama dengan masa Demokrasi Parlementer, mengalami polarisasi dan fragmentasi yang pada gilirannya mempersulit proses pengambilan keputusan di legislatif. Beberapa contoh dan kasus yang dipertontonkan oleh DPR dalam penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan lain-lain baru-baru ini cukup sebagai bukti menunjukkan adanya negosiasi-negosiasi dimaksud.

Persoalannya bagaimana cara untuk menciptakan sistem multipartai sederhana tersebut. Tentu saja dalam proses penyederhanaan partai tersebut harus berjalan secara alami, tidak seperti yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Sebenarnya dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu mencoba untuk menyederhanakan jumlah partai dengan menerapkan syarat yang ketat untuk pendirian atau pembentukan partai politik dan memberlakukan ambang batas (*electoral threshold*) untuk dapat ikut pemilu berikutnya.

Cara lain untuk menyederhanakan partai politik adalah dengan cara menerapkan sistem pemilu distrik. Seperti diyakini oleh Duverger bahwa sistem distrik lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik dan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa diadakan paksaan. Sementara dalam sistem proposional cenderung mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai politik baru. Sistem ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.

Memang kelebihan sistem distrik dapat menyederhanakan jumlah partai karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik (daerah pemilihan) hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama. Dengan berkurangnya partai, pada gilirannya akan meningkatkan kerjasama antara partai-partai dan mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional. Selain itu juga, sistem distrik dapat meningkatkan kualitas keterwakilan karena wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik sehingga hubungannya dengan terwakil lebih erat, dan dengan demikian ia akan mendorong untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Meskipun sistem distrik diakui dapat menyederhanakan jumlah partai politik, namun pilihan bagi Indonesia untuk saat ini belum bisa menerapkan sistem ini. Hal ini karena, sebagaimana diketahui, bahwa bangsa Indonesia sangat heterogen. Kondisi seperti itu bila menerapkan sistem distrik maka golongan-golongan yang ada, terutama golongan-golongan minoritas, kurang terakomodir.

Oleh karena itu, saya kira pilihan untuk tetap menerapkan sistem pemilu proporsional merupakan suatu pilihan yang tepat. Kondisi masyarakat Indonesia yang plural tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu penerapan sistem proporsional merupakan wujud penghormatan dan pengakuan atas pluralitas masyarakat Indonesia. Kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat Indonesia, termasuk kelompok minoritas, harus diakui eksistensinya.

Persoalannya, bagaimana dengan tetap menerapkan sistem proporsional jumlah partai politik secara alami dapat berkurang. Beberapa negara, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini, mencoba menerapkannya dengan memberlakukan *electoral threshold*. Di antara negara-negara yang besar menerapkan *electoral threshold* adalah Swedia dan Jerman, masing-masing 4 % dan 5 %. Khusus untuk Jerman, bagi partai politik yang tidak sampai memenuhi *electoral threshold* sebanyak 5 % maka wakil-wakilnya yang terpilih tidak bisa duduk dalam parlemen.

Daftar Beberapa Negara Yang Menerapkan
Electoral Threshold

Negara	<i>Electoral Threshold</i>
Argentina	3 %
Bolivia	3 %
Denmark	2 %
Indonesia	3%
Israel	1 %
Jerman	5 %
Polandia	5%
Meksiko	2 %
Norwegia	2 %
Swedia	4 %

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Dengan menerapkan PT maka partai-partai politik yang tidak memenuhi batas ambang yang ditetapkan dalam PT tersebut tidak bisa memperoleh kursi di DPR. Dengan memberlakukan PT ini pada gilirannya nanti jumlah partai-partai politik di DPR yang efektif relatif sedikit.

IV. Penutup

Dalam era reformasi ini, partai politik menjadi salah satu institusi yang penting. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Meski berbagai reaksi yang beragam terhadap eksistensi partai politik kekinian, semua pihak sepakat bahwa demokrasi akan semakin baik bila partai politik profesional dan akuntabel. Tantangan inilah yang menjadi pekerjaan berat yang harus disikapi bersama oleh semua komponen bangsa di mana kehadiran partai politik yang profesional, demokratis dan akuntabel menjadi kebutuhan saat ini.

Salah satu instrumen penting dalam demokrasi perwakilan adalah partai politik. Partai merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Tanpa ada partai politik maka demokrasi tidak akan bisa bekerja dan berjalan. Paling tidak ada tiga alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi. Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik; kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan; dan ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.¹⁶

Keberadaan partai politik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi. Partai merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan karena memang keberadaan partai politik untuk maksud tersebut. Dalam konteks itu, parpol harus melaksanakan sejumlah fungsi. Di antara fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik, yaitu fungsi : sebagai mediasi antara pemerintah dan rakyat; pencalonan kandidat; mengorganisasi pemerintahan; mendorong akuntabilitas publik; pendidikan politik; dan pengatur konflik.¹⁷

Ada beberapa faktor, yang membuat tingkat pelebagaan partai belum berkembang dengan baik. Pertama, partai-partai yang diteliti umumnya relatif baru sehingga infrastruktur partai belum terbangun dengan baik. Kedua, partai-partai yang ada kerap terjadi konflik yang menguras tenaga dan waktu sehingga tidak ada waktu untuk membangun pelebagaan partai politik. Ketiga, elit-elit partai belum menjadi aturan main partai (AD/ART) sebagai *the only one game* dalam mengelola partai politik. Keempat, tradisi berpartai yang menghormati

16 Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis* (Jakarta, 2006) hlm.10

17 Tentang fungsi partai politik, antara lain dapat dilihat, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.

perbedaan (budaya politik demokratis) di kalangan elit partai belum tumbuh, unsur patrimonialisme dan bahkan feodalisme masih kuat di kalangan elit-elit partai.

Upaya agar partai politik berfungsi dengan baik, usaha yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui penguatan kelembagaan partai politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. Dalam konteks tersebut, upaya penguatan platform partai, kaderisasi, rekrutmen politik, dan menciptakan kohesivitas internal partai, merupakan suatu keniscayaan yang mesti segera dilakukan oleh partai-partai politik. Apabila faktor-faktor tersebut (platform, kaderisasi, rekrutmen, dan kohesivitas internal) begitu kuat dan kokoh pada diri partai politik, maka pada gilirannya akan membentuk partai politik yang kuat dan tangguh pula.

Terkait dengan sistem multipartai, beberapa ahli berpendapat bahwa sistem multi partai itu tidak kompatibel dengan system presidensial yang kita terapkan saat ini. Mainwaring dan Linz mengatakan bahwa problem sistem presidensial manakala dikombinasikan dengan sistem multipartai.¹⁸ Kombinasi seperti ini akan menghasilkan instabilitas pemerintahan. Ini terjadi karena faktor fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen dan “jalan buntu” bila terjadi konflik relasi eksekutif-legislatif. Oleh karena, dalam sistem presidensial lebih cocok menggunakan sistem dwi partai. Dengan menggunakan sistem ini, efektivitas dan stabilitas pemerintahan relatif terjamin.

Berbeda dengan kedua ahli di atas, Arend Lijphart mengatakan bahwa dalam sistem multi partai juga bisa menghasilkan sistem demokrasi presidensial yang efektif dan stabil. Kondisi itu, menurutnya, bisa di atasi dengan cara mengembangkan demokrasi konsensual (demokrasi konsensus). Salah satu ciri demokrasi konsensual, menurut Arendt, yaitu dengan membangun koalisi pemerintahan (kabinet) di antara partai-partai politik.¹⁹

Model demokrasi konsensual yang perlu dibangun, dan selama ini sudah terbentuk, adalah memperkuat koalisi pemerintahan. Sebagaimana dikatakan oleh Arend bahwa bisa saja masyarakat yang plural dengan sistem multipartai

18 Lihat Scott Mainwaring, “Presidensialisme di Amerika Latin” dan Juan J Linz, “Resiko Dari Presidensialisme”, dalam Arend Lijphart (ed.), *Sistem Pemerintahan Parlemeter dan Presidensial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

19 Sebagai contoh, dalam kasus di Swiss dan Belgia, Arend mengemukakan 10 ciri demokrasi konsensus di kedua negara tersebut yang dijadikan consensus bersama, yaitu (1) Executive power-sharing in broad coalition cabinets; (2) Executive-legislative balance of power; (3) multiparty system; (4) proportional representation; (5) interest group corporation; (6) federal and decentralized government; (7) strong bicameralism; (8) constitutional rigidity; (9) judicial review; and (10) Central bank independence. Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven and London, Yel University, 1999, 34-41.

dengan kombinasi sistem presidensial, antara lain, dengan membangun koalisi dalam pemerintahannya. Koalisi yang dibangun selama ini merupakan bagian dari model demokrasi konsensual seperti dikemukakan oleh Arendt tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Ananta, at all, *Emerging Democracy in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2005.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Croissant, Aurel, Gabriele Bruns, dan Marei John (eds), *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Jakarta; FES dan Pensil-324,
- Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Dhakidae, Daniel, *Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program*, Jakarta: Kompas, 1999.
- Fatah, Eep Saefulloh, "Koalisi", *Tempo*, 25 April 2004.
- Fatah, Eep Saefulloh, "Kobabitasi Ala Indonesia", 9 Oktober 2007.
- Feith, Herbert dan Lance Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Geertz, Clifford, *Islam, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981
- Haris, Syamsuddin, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta; Yayasan Obor, 1999.
- Hatta, Moh. *Demokrasi Kita*, Jakarta: Jambatan, 1966.
- Huntington, Samuel P, *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yel University Press, 1968.
- IPCOS, *Partai dan Kita*, Jakarta, 2001
- Kaisiepo, Manuel. "Partai Baru atau Sistem Kepartaian Baru, *Kompas*, 20 September 1994.
- Lijphart, Arend (ed.), *Sistem Pemerintahan Parleментар dan Presidensial*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lijphart, Arend, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven and London, Yel University, 1999.

- Randal, Vicky and Lars Svasand. "Party Institutionalization in New Democracies", dalam *Party Politics* Vol. 8 No. 1. (London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications, 2002).
- Romli, Lili (ed.), *Evaluasi Pemilu 2004: Analisis Proses dan Hasil Pemilu Legislatif*, Jakarta: P2P LIPI, 2004.
- Romli, Lili, *Islam Yes, Partai Islam Yes*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Romli, Lili "Mencari Format Sistem Kepartaian di Indonesia", *Jurnal Politika*, Vol. 2 Tahun 2006.
- Romli, Lili, dkk, *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Puskapol FISIF UI dan Patnership, 2008.
- McAllister, Ian, "Party Adaptation and Factionalism in within the Australian Party System", *American Joernal of Political Science*, Vol. 35, No. 1 February, 1991.
- Mainwaring, Scott, "Party System in The Third Wave", dalam Larry Diamond and Marc F Plattner, *The Global Divergence of Democracies*, Baltimore and London; The Johns Hopkins University Press, 2000.
- Mainwaring, Scott, Party System in The Third Wave", dalam Larry Diamond and Marc F Plattner, *The Global Divergence of Democracies*, Baltimore and London; The Johns Hopkins University Press, 2000.
- Mair, Peter, "Party Sistem and Structures of Competition", dalam Lawrence Leduc, Richard G. Niemi, and Pippa Norris (eds.), *Comparing Democracies: Election and Voting in Global Perspective*, California: Sage Publication, Inc., 1996.
- Marijan, Kacung, "Demokrasi dan Stabilitas pemerintahan: Perbandingan Sistem Pemerintahan, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian", *Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP Unair*, 8 Desember 2007.
- Muzani, Saiful, "Plus-Minus Penyederhanaan Partai", *Majalah Tempo*, Edisi 9-15 Juli 2007
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*, Jakarta, 2006.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawaliipers, 2002.
- Subangun, Emmanuel, "Pemasaran Partai Politik", *Kompas*, 15 April 2008.

Surbakti, Ramlan “Tingkat Pelembagaan Partai Politik”, *Kompas*, 6 Januari 2003.

Tim Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004.

Tim LIPI, “Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Demokratis, Kuat da Efekti”, *Usulan Naskah Akademik Revisi UU Bidang Politik*, Jakarta: P2P LIPI, 2007.

Wardani, Sri Budi Eko, “Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006”, *Tesis*, Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI, 2007.